

**Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
terhadap Kinerja Laporan APBD Tahun Anggaran 2022
Di BPKAD Kota Cimahi**

Callula Ailsa Amanda¹, Tiris Sudrartono²

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha

callulaailsa@gmail.com¹, tiris.sudrartono@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to see the development of effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) application in BPKAD Cimahi City. This research uses descriptive qualitative research methods, with the existence of domestic regulation number 70 of 2019 which states that all regional devices are required to provide information related to regional financial information and other information through the SIPD application. The use of SIPD in BPKAD Cimahi City has various obstacles and benefits, one of the obstacles experienced is when preparing the 2022 APBD financial statements where there are several documents that cannot be inputted through the system making some SKPD have to input them manually and have to go to BPKAD, this causes ineffectiveness in preparing the 2022 APBD financial statements, and experiencing delays in document collection. BPKAD Cimahi City provides efforts to overcome this problem, namely by providing tutorials or procedures for inputting data properly and correctly and conducting training workshops on the use of SIPD.

Keywords: *Local Government Information System, Effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan efektivitas terhadap aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Dengan adanya peraturan dalam negeri nomor 70 tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua perangkat daerah diwajibkan memberikan informasi terkait informasi keuangan daerah maupun informasi lainnya melalui aplikasi SIPD. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Cimahi memiliki berbagai hambatan dan manfaat, salah satu hambatan yang di alami yaitu saat penyusunan laporan keuangan APBD tahun 2022 dimana ada beberapa dokumen yang tidak dapat diinput melalui sistem menjadikan beberapa SKPD harus menginputnya secara manual dan harus mendatangi BPKAD, hal ini menyebabkan ketidak efektifan dalam menyusun laporan keuangan APBD tahun 2022, dan mengalami keterlambatan pengumpulan dokumen. BPKAD Kota Cimahi memberi upaya terhadap permasalahan ini yaitu dengan cara memberikan tutorial atau tata cara penginputan data secara baik dan benar dan melakukan workshop pelatihan penggunaan SIPD.

Kata kunci: *Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Efektivitas*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini teknologi berkembang begitu sangat pesat dan beragam, masyarakat pun ikut merasakan dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Terbukti dari banyak nya masyarakat yang menggunakan teknologi untuk mencari informasi sebagai kebutuhan. Teknologi informasi ini adalah alat penggerak

untuk membuat informasi dan juga menghasilkan suatu sistem yang di sebut sistem informasi. Sistem informasi ini sendiri sangat di butuhkan di berbagai lembaga, bidang maupun perusahaan, salah satu bidang yang membutuhkan sistem informasi yaitu bidang akuntansi. Informasi yang di hasilkan bidang akuntansi berupa informasi laporan keuangan. Terkadang dalam menyusun laporan keuangan terdapat ke keliruan maupun kesalahan-kesalahan dalam mencatat laporan, dan menjadikan ketidakefektifan dalam menyusun laporan keuangan. Maka lembaga maupun perusahaan harus memperhatikan sistem informasi tersebut agar meminimalisir kesalahan dan meningkatkan keefektifan dalam menyusun laporan maupun keefektifan dalam waktu bekerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama satu periode. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah kota harus menyusun dan memperhatikan laporan keuangan agar hasil dari laporan tersebut berkualitas dan akurat. Seperti yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana ada satu acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah harus mempunyai empat unsur yaitu 1) relevan, 2) handal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami. Ke empat unsur tersebut dapat menjadikan acuan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas.

Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya untuk mengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Cimahi. BPKAD Kota Cimahi menerapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Terutama di bidang Anggaran pada tahun 2019 menggunakan Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dimana tertera pada Pasal 4 ayat 1 pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Ravinato Efektivitas adalah “seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif” (SUDRARTONO, 2019). “Efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi didalam perusahaan dapat dilihat dari cara pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan menginterpretasikan data tersebut” menurut Jumaili dalam (Antasari & Yaniartha, 2015).

Sistem Informasi menurut Nurmanto & Gunawan dalam (Riswanda & Priandika, 2021) adalah “suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan”. Sedangkan Menurut Puspitasari.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan good governance. Good governance adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, wajib melakukan keterbukaan informasi” Remaja, 2017 dalam (Nasution & M.Si, 2021). Maka tujuan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019.

Fahmi “menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut” (Herawati, 2019).

APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) merupakan rencana keuangan suatu daerah di Indonesia yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyusun APBD ada beberapa tahapan sampai dengan terbentuknya APBD yang di setujui. Tahapan dalam menyusun APBD di bagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan Input dan Output. Tahapan input meliputi Perencanaan, Verivikasi, Asistensi atau di sebut dengan tahapan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Tahapan Output meliputi cetakan RKA, Cetakan Standar, Cetakan lampiran Evaluasi Provinsi dan Cetakan APBD jika sudah di tetapkan.

Tabel 1. Data Input & Output yang ada di dalam SIPD dalam menyusun APBD Perubahan TA.2022

NO	DATA INPUT (RKA)	DATA OUTPUT
1	Perencanaan	Cetakan RKA
2	Verifikasi	Lampiran Evaluasi Provinsi
3	Asistensi	Cetakan Standar
4	Validasi	

Sumber. Bidang Anggaran BPKAD Kota Cimahi TA 2022

Dapat di lihat dari tabel 1, bahwa ada beberapa dokumen yang menjadi masalah dalam aplikasi SIPD sehingga pengguna SIPD atau beberapa TAPD datang langsung ke BPKAD Kota Cimahi untuk membuat laporan tersebut secara manual yang menyebabkan ketidak efektifan dalam menyusun Laporan APBD. Diduga karna adanya output yang belum maksimal pada dokumen cetakan APBD di aplikasi SIPD, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Laporan APBD Tahun Anggaran 2022 di BPKAD Kota Cimahi” dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang

ada serta mencari upaya yang tepat dalam meningkatkan efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Cimahi. Metode penelitian yang diambil penulis yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Erikson, 2018) dalam (Kosanke, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan bertujuan untuk mendeskripsikan objek hasil dari penelitian tersebut berupa penjelasan atau tulisan. Menurut Sugiono dalam (Rachmanidah & Rohmiyati, 2018) menjelaskan bahwa pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambar terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Deskriptif Kualitatif adalah riset atau penelitian yang bersifat analisis dan berdasarkan dari fakta dan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2016) dalam (Change et al., 2021).

Data yang diambil berupa data primer atau data yang didapat langsung tanpa perantara dengan melakukan wawancara. Menurut Stewart dan Cash dalam (Suprayogi et al., 2022) bagaimana wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara dua pihak yang setidaknya satu diantara mereka memiliki tujuan serius yang telah ditetapkan, pelatihan wawancara pada dasarnya harus melibatkan simulasi intensif. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan. Sumber informan di penelitian ini yaitu Kepala Sub. Bagian Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang tertera pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka untuk mewujudkan Perpres tersebut keluarlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh pemerintahan daerah menggunakan perangkat sistem informasi atau disebut dengan SIPD untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah. Yang berwenang atau mengelola informasi tentang keuangan daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat (a) Informasi perencanaan anggaran daerah, (b) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, (c) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, (d) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Informasi barang milik daerah,

dan (e) Informasi keuangan daerah lainnya. Informasi perencanaan anggaran daerah ini dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Tahapan penyusunan anggaran daerah ini meliputi, Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah, Penyusunan rancangan APBD, dan Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Demi mewujudkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dan mendorong kinerja pemerintah yang inovatif, efisien, dan berkualitas maka BPKAD Kota Cimahi menggunakan SIPD pada tahun 2019. Tetapi, dengan adanya harapan yang dikemukakan tersebut, sistem informasi terkadang masih menimbulkan kesalahan atau terkadang masih jauh dari harapan tersebut.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPKAD Kota Cimahi digunakan untuk menyusun dan memberikan informasi terkait keuangan daerah. Perbidang di BPKAD Kota Cimahi sudah menerapkan penggunaan aplikasi SIPD, dimana di dalam SIPD tersebut terdapat, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Didalam Sistem Informasi Keuangan Daerah terdapat laporan APBD atau laporan anggaran pendapatan belanja daerah, dimana laporan APBD ini menjadi tanggung jawab BPKAD di bidang anggaran. Laporan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang sudah di setujui DPRD, dengan adanya SIPD para TAPD atau SKPD di pemerintahan kota Cimahi melaporkan laporan APBD melalui bysistem tidak menyusun secara manual lagi. Hal ini membantu dalam menyusun laporan APBD.

Berikut beberapa keadaptasian adanya SIPD di BPKAD Kota Cimahi.

Keadaptasian SIPD

SIPD di implementasikan di BPKAD Kota Cimahi pada tahun 2019, dimana hanya bidang anggaran yang baru menggunakan SIPD untuk memberikan suatu informasi keuangan daerah dan kebijakan penggunaan anggaran daerah. Pada saat awal pengimplementasian SIPD di BPKAD Kota Cimahi masih banyak terjadinya eror sistem, adapun beberapa pegawai yang belum paham cara penggunaan SIPD tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu dan upaya yang dilakukan, SIPD menjadi sistem yang membantu dalam pengefektivan dalam menyusun kinerja laporan keuangan di BPKAD Kota Cimahi.

Manfaat SIPD

Menurut hasil wawancara dengan Kepala. Sub Bagian Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Cimahi, adanya SIPD ini berdampak sangat signifikan. Dampak yang di rasakan dengan adanya aplikasi SIPD ini juga bermanfaat bagi pihak eksternal seperti TAPD pemerintahan kota Cimahi bisa melaporkan RKA-nya dan laporan keuangan lainnya melalui bysistem tanpa harus datang langsung ke BPKAD Kota Cimahi. Manfaat lainnya seperti pekerjaan menyusun laporan keuangan lebih efektif karena tidak dilakukan secara manual. Dengan adanya SIPD BPKAD kota Cimahi bagian anggaran menghapus dan tidak menggunakan aplikasi lain selain SIPD untuk menyebarkan informasi keuangan pemerintahan kota Cimahi.

Masalah dalam SIPD

Menurut hasil wawancara dengan Kepala. Sub Bagian Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Cimahi, bahwa adanya SIPD ini sangat membantu dimana dalam menyusun laporan keuangan daerah. Tetapi penulis menemukan suatu hambatan atau masalah pada saat penyusunan laporan APBD TA 2022 di BPKAD Kota Cimahi di saat proses untuk menghasilkan dokumen cetakan APBD di unit output sehingga terjadi keterlambatan pengumpulan data atau hal ini menimbulkan ketidakefektifan dalam kinerja laporan APBD TA 2022. Pada saat proses penyusunan APBD TA 2022 ini mengalami sedikit keterlambatan dalam mengumpalkan dokumen tersebut dari beberapa TAPD, masalah yang dialami oleh beberapa TAPD dalam menyusun laporan ini yaitu masalah beberapa sistem belum terakomodir terutama dalam menampilkan PDN (Produk Dalam Negeri).

Dalam menampilkan PDN (Produk Dalam Negeri) terkadang dengan bysistem masih kurang valid, karena dalam menentukan PDN masih harus di diskusikan oleh BPKAD yang menyebabkan TAPD harus datang ke BPKAD untuk menanyakan kebijakan seperti apa dan menanyakan kode rekening PDN tersebut. Selain itu masalah yang terjadi saat menyusun APBD TA 2022 ini dimana terjadi eror saat akan input data di SIPD tersebut, penyebab eror ini yakni limitnya jaringan pada sistem SIPD dan banyak nya pengguna yang mengakses SIPD secara bersamaan, atau tidak direspon beberapa detik oleh si pengguna sistem akan tertutup atau eror. Adapun dokumen saat akan melakukan evaluasi provinsi dilakukan secara manual menggunakan excel karena data tidak dapat di tarik semua oleh bysistem.

Upaya

Masalah – masalah tersebut mengakibatkan keterlambatan waktu dalam kinerja menyusun laporan APBD TA 2022. Kefektifan kerja pun terhambat dikarenakan TAPD harus mendatangi BPKAD Kota Cimahi untuk meminta validasi terhadap beberapa no rekening. Tetapi BPKAD Kota Cimahi menemukan solusi atau upaya dalam menanggapi permasalahan tersebut, seperti melaporkan masalah yang terjadi kepusat agar sistem di upgrade, memberikan akses pertambahan waktu untuk menginput data tahapan laporan keuangan karena sistem limit. Dan penulis memberikan upaya agar memberikan pelatihan tutorial terhadap TAPD untuk penggunaan ataucara input laporan ke SIPD. Seiring berjalannya waktu SIPD ini sudah membaik di tunjukan dengan efektif nya penyusunan APBD TA 2023, terjadinya eror sangat minim dan dokumen yang sebelumnya di input secara manual sekarang sudah bisa menggunakan bysistem. Hal tersebut meningkatkan keefektifan dalam kinerja laporan keuangan APBD TA 2023.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya SIPD di BPKAD Kota Cimahi ini sangat berdampak sangat positif, dimana dengan adanya SIPD beberapa informasi keuangan bisa di akses melalui bysistem, hal ini menjadikan keefektifan kerja dan keefektifan waktu kerja PNS dan TAPD yang akan melaporkan informasi keuangan terutama laporan APBD ini bisa

melalui bysistem tidak di kerjakan secara manual. Dan adanya SIPD ini dapat meminimalisir kekeliruan atau kesalahan dalam menyusun laporan keuangan karena melalui bysistem.

Kinerja laporan keuangan APBD TA 2022 mengalami keterlambatan karena beberapa sistem yang ada di SIPD belum terakomodir dengan baik, yang menyebabkan TAPD mengharuskan berbolak balik untuk mendatangi secara langsung BPKAD meminta upaya seperti apa agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan ada beberapa dokumen yang dikerjakan secara manual.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu, memberikan pelatihan terhadap TAPD dengan melakuakn turotial penginputan data yang benar. Melaporkan beberapa masalah yang sulit ditangani ke pusat agar sistem informasi pemerintahan daerah nya di upgrade.

Saran

Melakukan pelatihan atau workshop kepada PNS dengan memberikan tutorial berupa cara penyusunan laporan APBD dengan menggunakan bysistem melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Memberikan sesi waktu penginputan data output melalui bysistem perSKPD nya, agar menghindari antrian yang menyebabkan melebihi limit jaringan, untuk menghindari eror sistemnya.

Menambah atau mengupgrade fitur baru pada sistem input RKA yaitu fitur validasi nomor rekening, agar TAPD tidak perlu lagi menanyakan langsung kepada pihak BPKAD, dan mengurangi keterlambatan dalam penyusunan laporan RKA serta menambah efektivitas waktu kerja.

Mengupgrade system output yaitu pada dokumen cetakan provinsi agar bisa diinput semua datanya tidak perlu lagi mengerjakan secara manual melalui excel.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, K. C., & Yaniartha, D. (2015). Informasi Pada Kinerja Individual Dengan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 354–369.
- Change, G., Cimino, M., York, N., Alifah, U., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Chinatown, Y., Staff, C., & Change, G. (2021). Eektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 16–25.
- Kosanke, R. M. (2019). *Studi Deskriptif Kualitatif Program CSR Pemberian Beasiswa kepada Siswa SMP Masyarakat Berpenghasilan Rendah PDAM Surya Sembada*. 10(2), 460–469.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

- Rachmanidah, A., & Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Tingkat Plagiarisme Karya Ilmiah Jurnal Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UNDIP Tahun 2015-2016 dengan Software Turnitin. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), 11–20. <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Riswanda, D., & Priandika, A. T. (2021). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Barang Berbasis Online. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 94–101. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/730>
- SUDRARTONO, T. (2019). Efektivitas Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Daya Saing Produk Boneka (Studi Kasus pada Sentra Industri Boneka Sukamulya Bandung). *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(3), 203–209. <https://doi.org/10.35899/biej.v1i3.65>
- Suprayogi, S., Puspita, D., Putra, E. A. D., & Mulia, M. R. (2022). Pelatihan Wawancara Kerja Bagi Anggota Karang Taruna Satya Wira Bhakti Lampung Timur. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 356–363. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.4494>